



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN NELLE

Jl. Moan Subu Sadipun, Nelle 86119 – Maumere - Flores
Telepon/WA: 0812 3690 5156 | Email: kecamatannelle@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT NELLE

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

(PAUD) ST. ARNOLDUS JANSSEN

DESA NELLE WUTUNG

CAMAT NELLE

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Pos Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD),Taman Kanak – Kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat;

c. bahwa Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) St. Arnoldus Janssen sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka nomor : 195/SK/PPO/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010, dan sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 128/RKD /PKO/2021 tanggal 6 Desember 2021 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat Nelle tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini St. Arnoldus Janssen.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35.
17. Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjang Ijin Operasional Kepada :
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nama lembaga | : PAUD ST. Arnoldus Janssen |
| Jenis Satuan PAUD | : PAUD |
| Alamat | : Dusun Kode,
RT.004/RW.002 |
| Desa | : Nelle Wutung |
| Kecamatan | : Nelle |
| Kabupaten | : Sikka |
| Pemimpin / Penanggungjawab | : Kepala Desa Nelle Wutung |
| Penyelenggara / Pengelola | : Dra. Praxedis Sadipun |
- KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan kegiatan Pengembangan PAUD St. Arnoldus Yanssen sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan;
 3. laporan berkala tentang kegiatan PAUD St. Arnoldus Janssen sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan ke Kecamatan Nelle dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- KETIGA : Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional Wajib menyampaikan ke Kecamatan Nelle dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PAUD St. Arnoldus Janssen;

- KEEMPAT : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD St. Arnoldus Janssen berlaku selama tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nelle
Pada tanggal : 10 Januari 2022

